

PERANAN MANAJEMEN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Oleh: Heidjrachman Ranupandojo

Negara Barat lebih maju dari negara Timur
karena negara Barat lebih dahulu
mengetrapkan manajemen.
URWICK

Pendapat Urwick tersebut di atas, mengandung kebenaran, seperti yang kita saksikan dewasa ini. Negara-negara Barat memang lebih maju dari negara-negara Timur dalam banyak hal, khususnya dalam pembangunan ekonomi dan beberapa sektor lainnya. Sejarah memang membuktikan bahwa manajemen yang kita kenal sekarang ini berasal dari negara Barat. Mereka menggali dan merumuskan apa yang dirasakan dan dilaksanakan di sana, serta melakukan penelitian-penelitian guna membuktikan hipotesis-hipotesis yang mereka rumuskan. Dengan penelitian yang mereka lakukan, akhirnya dapat dirumuskan apa yang disebut dengan manajemen itu, dan apa kegunaannya dalam usaha mencapai tujuan mereka.

Pada awal pengkajiannya, memang terjadi perdebatan, mengenai apakah manajemen itu merupakan seni yang lebih banyak dipengaruhi oleh bakat seseorang dalam pengetrapannya, ataukah manajemen itu suatu ilmu yang dapat dirumuskan secara sistematis, yang dapat diajarkan dan dipelajari oleh semua orang. Ternyata, dalam serjalanan sejarahnya, akhirnya diakui bahwa manajemen memang memiliki sifat sebagai ilmu. Hal ini berkat jasa banyak ahli manajemen, seperti F.W. Taylor, Elton Mayo dan banyak ahli manajemen lain, yang dengan kerja kerasnya, terbukti bahwa manajemen dapat dipelajari dan diajarkan.

Berkat jasa-jasa merekalah kita sekarang dapat memperbincangkan masalah manajemen Indonesia dari segi "plus, minusnya", khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan, yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Isyu yang "santer" dewasa ini adalah bahwa manajemen di Indonesia masih rapuh di segala segi, sehingga kurang berdaya guna dalam mencapai tujuan pembangunan ini. Bahkan secara khusus Tanri Abeng, Direktur Bir Bintang, menyatakan bahwa kelemahan manajemen di Indonesia terletak pada

perencanaannya. (Kedaulatan Rakyat, 6 Desember 1985). Hal ini dimengerti sebab berbagai produk perencanaan, merupakan pedoman pelaksanaan, koordinasi, dan pengendali kegiatan agar sesuai dengan rencananya. Kalau rencananya sendiri rapuh, bagaimana tujuan dapat dicapai dengan hasil guna yang tinggi? Kondisi inilah yang mendorong kampanye tentang hasil guna (efisiensi), yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden sendiri. Gerakan hasil guna di segala bidang, akan merupakan suatu isu yang teramat menarik untuk diperbincang-bincangkan, karena hal ini akan menyangkut banyak sekali aspek peri kehidupan masyarakat itu sendiri.

Pancasila, UUD 1945 dan manajemen Indonesia

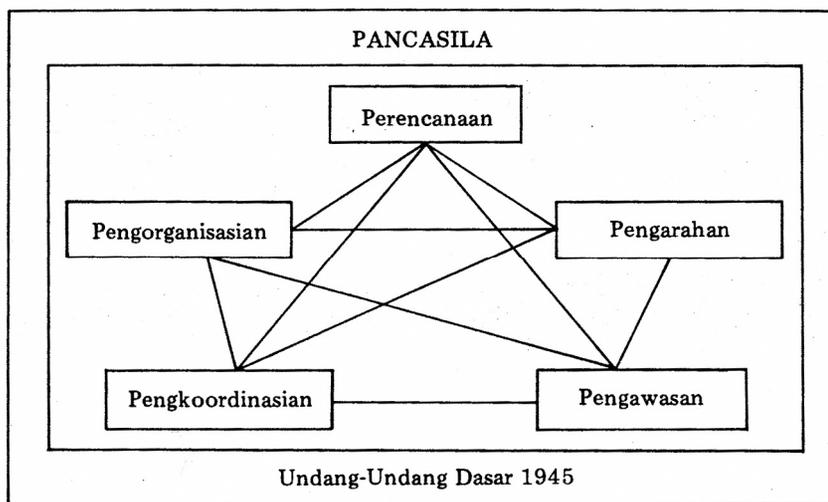
Setelah ramai orang berbicara tentang rapuhnya manajemen, yang didahului dengan isu ekonomi biaya tinggi dan pola kerja yang tidak berhasil guna, maka perbincangan diarahkan pada usaha mencari ciri-ciri manajemen Indonesia, atau manajemen khas Indonesia, yang diharapkan mampu mengatasi kumelut ekonomi biaya tinggi melalui manajemen yang berhasil guna.

Manajemen khas Indonesia adalah manajemen yang dilandasi oleh falsafah hidup bangsa Indonesia sendiri. Dalam hal ini jelas Pancasila dan UUD 1945 akan memberikan "warna dasar" bagi manajemen Indonesia ini. Tak ubahnya manajemen Jepang yang sangat terkenal akhir-akhir ini karena keberhasilannya dalam membangun ekonomi Jepang dalam waktu yang relatif amat singkat, adalah perpaduan antara manajemen barat atau manajemen yang universal plus kebudayaan Jepang. Boleh dikatakan, manajemen Jepang adalah 95% manajemen barat dan 5% adalah kebudayaan Jepang atau dapat pula dikatakan, manajemen Jepang adalah manajemen barat yang "ditanamkan" pada bumi budaya Jepang. Prinsipnya, manajemen Jepang tetaplah manajemen barat, dengan sedikit modifikasi untuk disesuaikan dengan budaya yang ada di Jepang. Teknik menterpadukan manajemen barat dengan kebudayaan setempat, yang telah dilakukan oleh Jepang ini patut dipelajari dan selanjutnya kita jadikan "pengalaman" untuk dasar kita mencoba mengawinkan manajemen barat dalam wadah Pancasila dan UUD 1945.

Menciptakan manajemen khas Indonesia, atau barangkali dapat Kita sebut sebagai manajemen yang ber-Pancasila dan ber-UUD 1945, tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah berat akan meminta perhatian khusus dan

secara terus-menerus. Salah satu masalah terberat dalam membentuk manajemen khas Indonesia, justru karena masih banyak orang Indonesia yang masih kurang menghayati dan mengamalkan jiwa Pancasila dan UUD 1945, bahkan sering kita melihat, orang yang telah mengikuti penataran P-4 pun masih belum mampu menghayati dan mengamalkan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Kondisi ini timbul sebagai akibat adanya tarikan dari budaya asing yang diam-diam menyusup baik secara "resmi" maupun "tak resmi" dan mengajarkan kepada kita pola hidup "individualistik" yang sedikit demi sedikit "melunturkan" semangat dan jiwa kegotong-royongan yang telah lama mengakar di bumi pertiwi ini. Perilaku di bawah sadar yang dilakukan oleh segelintir "oknum" ternyata cepat menyebarkan pengaruh pada lingkungannya, dan sedikit demi sedikit "menjebak" orang untuk ikut-ikutan terbawa arus individualistik tadi. Salah satu contoh, dibangunnya kompleks-komplek perumahan, ternyata membawa dampak negatif yang kurang disadari berupa "persaingan terselubung" yang mendesak orang untuk memasuki pola hidup baru, yaitu "pola hidup boros, bersifat lebih konsumtif dan tidak produktif", atau dalam bahasa populer sehari-hari disebut sebagai "pola hidup jor-joran". Kondisi semacam ini, sedikit demi sedikit akan menjauhkan kita dari usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Inilah sebenarnya tantangan terberat untuk menciptakan manajemen ala Indonesia atau manajemen yang dijiwai oleh jiwa Pancasila dan UUD 1945. Harapan besar, kita gantungkan pada usaha Pemerintah dalam melaksanakan program P-4, semoga dengan P-4 tersebut, kesadaran untuk penghayatan dan pengamalan Pancasila serta jiwa UUD 1945 membuahkan hasil yang diharapkan. Jika P-4 ini mampu melahirkan "manusia baru" yaitu manusia yang benar-benar berjiwa dan berakal serta berorientasi untuk mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka melahirkan manajemen khas Indonesia sangatlah mudah, semudah kita membalikkan telapak tangan kita sendiri.

Manajemen ala Indonesia yang diharapkan mampu menjadi alat yang berdaya guna dalam mengatasi berbagai problema yang dihadapi oleh pembangunan ini, adalah manajemen universal yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945. Di bawah ini adalah gambar manajemen ala Indonesia yang dimaksud.



Undang-Undang Dasar 1945

Pada gambar di atas terlihat, fungsi-fungsi manajemen yang universal itu, yaitu fungsi-fungsi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, dan Pengawasan, yang satu sama lain saling berhubungan "hidup" dalam wadah Pancasila dan UUD 1945. Fungsi-fungsi manajemen tersebut haruslah memiliki jiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap gerak dan aktivitasnya. Apabila hal ini dapat diwujudkan, maka pembangunan di Indonesia akan mampu pula melaksanakan tugas-tugasnya dalam waktu yang relatif singkat, tak ubahnya dengan Jepang "saudara tua kita" itu.

Manajemen dan Tri Gatra

Dalam pembangunan, diperlukan modal dasar, yang menjadi faktor masukan (input). Keberhasilan pembangunan, sedikit banyak juga ditentukan oleh modal dasar yang dimiliki suatu negara. Negara yang memiliki modal dasar yang besar baliq potensial maupun riil, akan mampu membentuk dirinya menjadi negara yang besar dan kuat. Masalahnya, tinggal bagaimana bangsa itu memiliki kemampuan memproses modal dasar tersebut. Salah satu instrumen dalam pemrosesan modal dasar tersebut adalah manajemen. Dengan manajemen yang tepat, pemrosesan modal dasar akan menghasilkan keluaran (output) yang diinginkan.

Pembangunan ekonomi Indonesia, tak dapat diungkiri lagi, bahwa usaha meneapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pasti berhasil. Hal ini mengingat modal dasar yang kita miliki, yang secara potensial amat

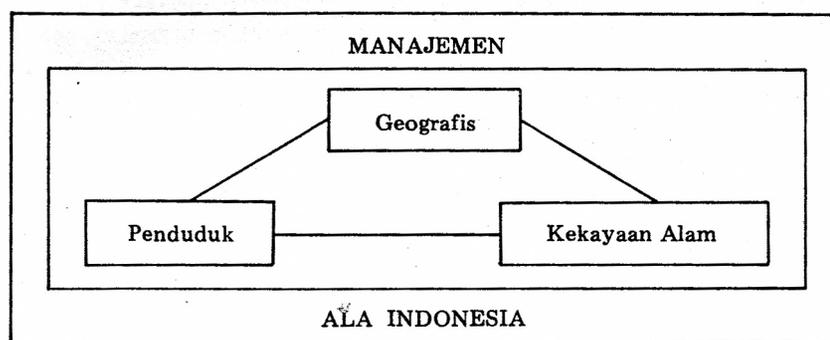
mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Tinggal masalahnya, kita memerlukan manajemen yang tepat untuk mengolah modal dasar tersebut.

Modal dasar yang kita miliki, dalam cakupan yang luas, kita kenal sebagai Tri Gatra, yang terdiri dari:

1. Kondisi Geografis yang amat strategis karena berada di tengah persimpangan lalu lintas dunia, dan berada di antara dua benua dan dua samudera.
2. Kondisi penduduk yang memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, dan memiliki jumlah yang cukup besar, merupakan modal dasar kedua atau gatra kedua.
3. Kekayaan alam Indonesia yang kaya raya, bahkan sumber-sumber alam seperti yang kita miliki hampir tidak dimiliki oleh negara-negara lain, merupakan gatra ketiga.

Tri Gatra merupakan modal yang amat penting bagi suksesnya pembangunan perlu dikelola dengan sebaik mungkin agar tidak terbuang-buang percuma atau banyak sumber daya dan dana yang ter-boroskan tanpa membawa hasil yang diinginkan. Jadi kunci kemanfaatan Tri Gatra pada pembangunan amatlah tergantung pada manajemen yang dipergunakan mengelola Tri Gatra tersebut. Dengan demikian tidak perlu diungkiri, bahwa manajemen memiliki peranan besar dalam memproses input pembangunan, untuk dirubah menjadi output yang diinginkan. Adapun hubungan Tri Gatra dengan manajemen ala Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini.

Hubungan Tri Gatra dengan Manajemen ala Indonesia



Gambar di atas memperlihatkan bahwa manajemen khas Indonesia dipergunakan untuk mengelola Geografis, Penduduk dan Kekayaan alam Indonesia. Kondisi geografis yang khas, yaitu terdiri dari ribuan pulau, membutuhkan pengelolaan yang khas pula. Dewasa ini baru beberapa pulau yang sudah ditangani pembangunannya dengan serius, sedang sebagian pulau lain masih belum dikelola secara mamadai. Hal ini sering menimbulkan "kecemburuan sosial" dan berakibat membanjirnya penduduk ke pulau-pulau yang sudah baik tingkat pembangunannya. Seperti pulau Jawa misalnya, walau penduduk asli pulau Jawa telah ratusan ribu yang ditransmigrasikan keluar pulau Jawa, namun kepadatan penduduk pulau Jawa meningkat terus karena orang luar pulau Jawa lebih banyak yang masuk ke pulau Jawa sendiri. Pengelolaan penduduk yang ditangani dengan sistem Keluar-ga Berencana (KB) dan transmigrasi, rasanya tidak banyak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Sampai akhirnya, untuk pengelolaan penduduk ini diangkat seorang menteri urusan kependudukan. Pengelolaan kekayaan alam, dewasa ini masih sangat tergantung pada pengusaha-pengusaha asing. Hal ini tentu saja sangat merugikan kepentingan pembangunan itu sendiri. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, sudah selayaknya apabila Tri Gatra digarap dengan manajemen kita sendiri, yaitu manajemen ala Indonesia.

Manajemen dan pembangunan

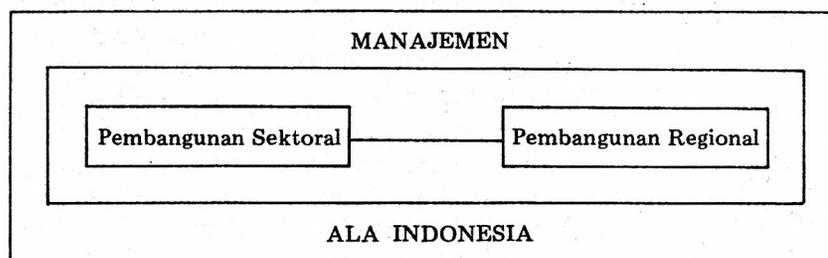
Kegiatan pembangunan pada dasarnya dapat dibedakan dari dua segi, yaitu pembangunan sektoral dan pembangunan regional.

Kegiatan pembangunan sektoral adalah kegiatan pembangunan pada sektor-sektornya, seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, sektor air, listrik dan gas, sektor bangunan dan seterusnya. Sektor-sektor ini jelas saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga diperlukan koordinasi yang tepat. Namun sayang, dewasa ini, masalah koordinasi sektoral masih rawan sehingga masih seringkali terjadi adanya "tabrakan" kepentingan, ataupun timbul "kesenjangan" antar sektor, yang berakibat tidak dicapainya hasil optimal dalam pembangunan sektoral tersebut. Demikian juga dalam pembangunan regional, koordinasi ini juga merupakan "ganjelan" antara pejabat-pejabat daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya sendiri-sendiri. Dalam praktek, sering dijumpai, suatu daerah mencegah

mengalirnya bahan-bahan bangunan ke daerah tetangganya, dengan alasan sangat diperlukan bagi pembangunan daerah sendiri. Akhirnya, secara diam-diam terjadilah "perang dingin" antar daerah dalam penguasaan sumber-sumber pembangunan yang semestinya dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Kasus-kasus yang ada di lapangan, baik untuk pembangunan sektoral maupun regional, masih memperlihatkan "kerapuhan" manajemen pembangunan ini. Hal ini tentu saja kurang menguntungkan bagi hasil pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Di sini jelas, peranan manajemen ala Indonesia diperlukan, guna memberikan pengertian bagi pejabat di tingkat regional maupun pejabat sektoral, agar terjadi jalinan yang erat dan saling mengisi kegiatan-kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat membuahkan hasil yang diinginkan bersama, seperti yang diharapkan oleh segenap warga bangsa Indonesia.

Secara skematis, hubungan manajemen ala Indonesia, dengan obyek pembangunan, yaitu regional dan sektoral, dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Hubungan manajemen ala Indonesia dengan obyek pembangunan.

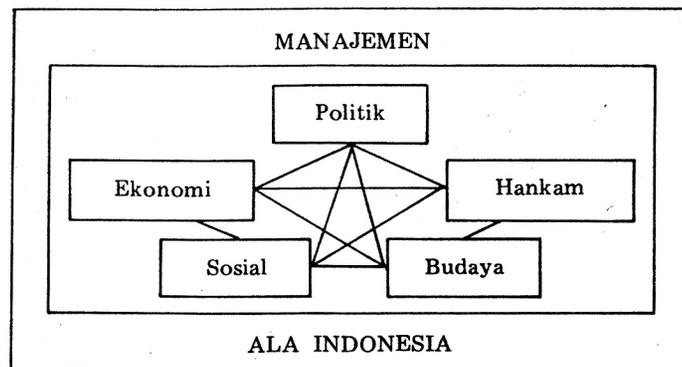


Manajemen dan Panca Gatra

Pembangunan sektoral dan regional, keberhasilannya banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Kelima faktor lingkungan ini sering dikenal sebagai Panca Gatra dalam Wawasan Nusantara. Panca Gatra memiliki peranan yang amat besar dalam pembangunan sektoral maupun regional, dengan dampak baik yang bersifat positif maupun sifat negatif. Mengingat Panca Gatra dapat membawa dampak negatif, maka perlu ada tindakan pencegahan khususnya yang berdampak negatif tersebut. Tindakan yang diperlukan dalam hal ini adalah mengelola Panca Gatra sebaik mungkin, dan diarahkan pada pembentuk-an Panca Gatra menjadi wadah yang menguntungkan bagi

pembangunan sektoral maupun regional. Jadi, Panca Gatra ini pun membutuhkan manajemen yang cocok untuk mengelolanya. Dan tentu saja, manajemen yang cocok di sini adalah manajemen yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 atau kita namakan manajemen ala Indonesia.

Hubungan manajemen ala Indonesia dengan Panca Gatra secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut ini.



Manajemen dan pembangunan ekonomi

Apa yang dikemukakan di muka akhirnya dapat dirangkum menjadi hubungan peranan manajemen dengan berbagai aspek pembangunan ekonomi. Secara ringkas, dapat dijelaskan urutan pengaruh atau peranan manajemen dengan faktor-faktor pembangunan tersebut.

Pertama, manajemen sebagai alat mencapai tujuan membentuk masyarakat adil dan makmur, harus dilandasi dengan Pancasila dan UUD 1945.

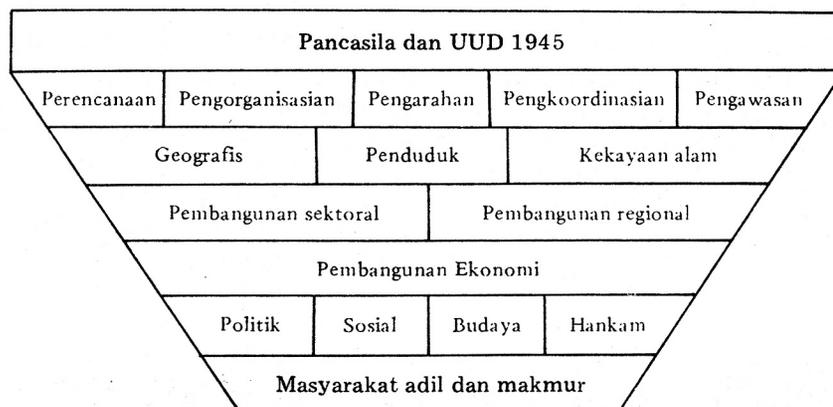
Kedua, manajemen atas dasar Pancasila dan UUD 1945 ini akan mengelola Tri Gatra sebagai unsur masukan dari proses pembangunan sektoral maupun regional.

Ketiga, manajemen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini juga diperlukan untuk mengelola obyek pembangunan yaitu sektoral dan regional.

Keempat, manajemen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 juga diperlukan untuk mengelola pembangunan ekonomi, beserta lingkungannya, yaitu lingkungan politik, sosial, budaya dan hankam. Dan dengan demikian, apabila manajemen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini mampu menjalankan tugas seperti tersebut di atas, maka cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, akan dengan mudah tercapai, sekurang-kurangnya akan mempercepat waktu pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang kita inginkan itu.

Dengan ringkas, gambaran peranan manajemen berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini nampak seperti skema berikut ini.

Peranan manajemen berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat adil dan makmur.



Beberapa masalah

Beberapa masalah yang menantang pembentukan manajemen berdasar Pancasila dan UUD 1945, dapat dikemukakan beberapa segi empiris sebagai berikut.

1. Produk perencanaan

Produk perencanaan yang berujud peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur dan lainnya, sering memiliki kelemahan yang kadang justru menghambat usaha mencapai tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pengalaman membuktikan dengan pergantian pejabat, akan muncul aturan, kebijakan, sistem dan prosedur baru, yang kurang mencerminkan kesinambungan dengan peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur pejabat lama. Kondisi ini banyak menimbulkan pemborosan di samping rasa "frustrasi" dari pelaksana-pelaksananya. Dari segi waktu, kondisi ini juga berarti menarik mundur apa yang telah dicapai sebelumnya. Kadangkala terbukti, bahwa peraturan, kebijakan, sistem dan prosedur yang ditetapkan masih merupakan hal yang belum teruji, bahkan seringkali kelihatan jelas sebagai sesuatu yang masih bersifat "coba-coba".

2. Pengorganisasian

Organisasi, baik dalam pengertian struktur maupun sikap, yang semestinya berfungsi sebagai "alat" mencapai tujuan, hampir setiap kali dirubah, bahkan

dipikirkan secara "jlimet", sehingga sering me-nimbulkan pertanyaan, apakah organisasi ini merupakan alat ataukah tujuan? Reorganisasi yang terlalu sering, menyebabkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai terpaksa mengalami kemunduran, di samping tentu saja memakan banyak biaya. Di bagian organisasi ini cukup banyak persoalan yang perlu dibenahi dalam rangka mewujudkan manajemen berdasar Pancasila dan UUD 1945.

3. Pengkoordinasian

Akibat lemahnya perencanaan, dan juga kelemahan dalam komunikasi dan penyediaan informasi, fungsi koordinasi tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Koordinasi antar kegiatan pembangunan dewasa ini jelas melahirkan banyak pemborosan, yang sebenarnya tidak perlu terjadi apabila fungsi koordinasi ini dapat dijalankan dengan baik.

4. Pengawasan

Masalah pengawasan, juga merupakan tantangan berat, disebabkan oleh kondisi perencanaan, koordinasi yang belum mapan, ditambah terlalu kurangnya jumlah pengawas, menjadikan fungsi pengawasan merupakan titik lemah dalam mewujudkan manajemen berdasar Pancasila dan UUD 1945. Kondisi para pengawas sendiri, ikut merupakan permasalahan yang harus dipecahkan. Dan ini tidak mudah, sebab menyangkut masalah sikap mental perseorangan.

5. Masalah orientasi manajemen

Masalah orientasi manajemen, membutuhkan "tekad" untuk memutuskannya. Pengalaman yang ada, untuk memutuskan orientasi manajemen ini, kelihatan kurang dilandasi oleh "tekad", khususnya dalam menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambilnya. Hal ini kelihatan dengan banyaknya "kebijaksanaan" yang diambil setelah menghadapi hal yang menjadi konsekuensi keputusan. Mengenai "kebijaksanaan" ini memang sering dilatarbelakangi dengan dalih kemanusiaankah, keadilanlah, musyawarah dan mufakatlah, atau dalil-dalil lain, yang sebenarnya tidak pada tempatnya dipergunakan untuk mendukung alasan pengambilan kebijaksanaan itu. Banyaknya kebijaksanaan yang diambil merupakan bukti kelemahan dalam

pelaksanaan keputusan yang telah diambil. Akibat ini semua, sering "warna" orientasi manajemen ini jadi kabur tidak jelas, dan sulit dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

6. Masalah efisiensi

Efisiensi merupakan sasaran dari manajemen. Dengan melaksanakan manajemen, diharapkan mencapai efisiensi yang tinggi, sehingga tujuan dicapai dengan pengorbanan tertentu. Namun, hal yang sering kurang disadari, yang menjadi konsekuensi dari tidak mencapai efisiensi ini, adalah cara untuk mencapainya. Cara mencapai efisiensi, umumnya dengan usaha meningkatkan output sebesar-besarnya. Hal ini sering "menjebak", khususnya kalau tidak diingat bahwa sumber input sangat terbatas, bahkan dapat dikatakan langka. Tanpa menyadari kondisi keterbatasan input, orang sering melakukan tindakan yang lebih "boros", sehingga peningkatan output dibayangi oleh pemborosan.

Akibatnya yang kita saksikan justru suatu tindakan yang menurut pepatah Jawa dinamakan "ngoyak uceng kelangan deleg", atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan "ingin mengejar hal yang kecil, malah kehilangan yang lebih besar", atau kalau digunakan pepatah lain, dapat disebut "mendengar guntur di langit, air di tempayan ditumpahakan". Mengingat hal ini sebaiknya, cara mencapai efisiensi hendaknya justru memperkecil tambahan input untuk meningkatkan output. Fungsi pengawasan hendaknya lebih dikonsentrasikan pada unsur input.

7. Permasalahan teknologi

Usaha mencapai efisiensi yang tinggi, mengundang permasalahan teknologi yang akan dipergunakan. Pada umumnya efisiensi dikejar dengan menggunakan teknologi maju. Namun diketahui bahwa teknologi maju, hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Akhirnya terjadi pertentangan kepentingan antara penggunaan teknologi maju dengan kepentingan sosial, di mana kegiatan produksi hendaknya berfungsi sosial, yaitu memberikan kesempatan kerja yang banyak atau lebih dikenal dengan teknologi padat karya. Dengan penggunaan teknologi padat karya, agak sulit untuk memperoleh tingkat efisiensi yang tinggi. Masalah teknologi ini memang merupakan masalah yang dilematis sifatnya.

8. *Permasalahan sikap mental*

Masalah yang tak pernah kunjung habisnya, adalah masalah sikap mental. Usaha mencapai efisiensi, dihadang oleh sikap bangsa Indonesia yang sudah dikenal sangat boros. Pemborosan di segala bidang dan dilakukan secara rutin, hampir dapat dikatakan bahwa "sikap boros" telah membudaya. Sikap boros inilah rasanya masalah terberat yang harus dihadapi bila ingin melaksanakan manajemen yang baik. Dan susahnyanya, lingkungan yang ada dewasa ini, justru "mendukung" lestarinya sikap boros tersebut.

Demikianlah sekelumit permasalahan manajemen dan peranannya bagi pembangunan pada umumnya, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Semoga tulisan pendek ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara pembaca.

Yogyakarta, 12 Desember 1985